

ETNOGRAFI UPAYA MENEMPATKAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN TIK BERLANDASKAN PADA MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

AN ETHNOGRAPHY OF ICT DEVELOPMENT POLICY PUTS EFFORT BASED ON SOCIETY AND CULTURE

Ahmad Sihabudin
FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan, Kota Serang – Banten
(sihab_tea@yahoo.com)

Diterima tanggal: 11-10-2012, Dikembalikan untuk direvisi tanggal: 24-10-2012: Disetujui tanggal: 10-11-2012

Abstrak: Tulisan ini menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap masyarakat dan kebudayaan sebelum sebuah kebijakan pembangunan diputuskan. Kebijakan pembangunan memang untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan manusia, hanya sayang dalam hal ini sering lupa memperhatikan manusia manakah yang dimaksud. Dalam lingkup Indonesia dengan berbagai kebudayaan dan etnik masalah ini menjadi penting diperhatikan. Tidak sedikit sebuah kebijakan pembangunan diambil dengan tidak memperhatikan kebutuhan dan budaya masyarakat tidak optimal manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, persoalan pembangunan untuk siapa menjadi sangat penting diperhatikan, artinya, kita tidak dapat menggunakan ukuran yang ada pada sistem nilai kita saja, yang biasa menjadi penentu ukuran penentu kebijakan itu. Dengan pemahaman ini kebijakan pembangunan dapat ditentukan dari pandangan atau pemikiran yang ada pada masyarakatnya, sehingga langkah yang akan ditentukan itu mengikuti realitas budaya yang dihadapi masyarakat. Salah satu pendekatan dan riset yang dapat menjawab permasalahan tersebut adalah etnografi komunikasi, karena berupaya mengkonstruksi tradisi dan pola komunikasi dalam suatu etnik atau komunitas tertentu.

Kata kunci: Kebijakan Pembangunan TIK, Masyarakat dan Kebudayaan, Etnografi.

Abstract: This paper explains the importance of understanding the culture and society before a development policy was decided. Development policy is to improve the standard of living and well-being, just a shame in this case often forget to consider the question Which human. Within the scope of Indonesia with a variety of cultural and ethnic diversity has become an important issue addressed. Not a bit of a development policy is taken with no regard to the needs and culture of the people is not optimal benefit and beneficial to the people. Therefore, the problem of development is very important for anyone to be considered, that is, we can not use existing size on our value system only, which used to be the decisive determinant of the size of the policy. With this understanding of development policy can be determined from the sight or thought is the people, so it's a step that will be determined following the cultural realities faced by the community. One of the approaches and research that can address those problems is ethnography of communication, for attempting to construct the traditions and patterns of communication within a particular ethnic or community.

Keywords: ICT for Development Policy, Society and Culture, Ethnography.

Pendahuluan

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sector kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan – perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM (usaha kecil menengah) dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sector kehidupan. (Ady Prabowo, 2008).

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan pendekatan proses “socio-ecological”, artinya suatu proses pembangunan yang bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup. Paradigma pembangunan berkelanjutan muncul pertama kali pada tahun 1980 ketika *The Union for the Conservation of Nature*, menerbitkan strategi pelestarian dunia dengan judul “The World Conservation Strategy”. Dalam laporan itulah untuk pertama kalinya tampil istilah “sustainable development”. Selanjutnya konsep tersebut menjadi istilah yang dipakai diseluruh dunia, terutama setelah diterbitkannya laporan dari the World Commission on Environment and Development (UN, 1987), yang dibentuk oleh PBB. (Kartasasmita, 2007).

Pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya akan memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat, dan dengan demikian masyarakat akan mampu memeliharanya. Pola pembangunan yang sesuai dengan kondisi ekologis akan mengikuti kecenderungan siklus alamiah dan akan mendapat hambatan minimum secara alamiah, sehingga mudah dan murah memeliharanya serta dapat me-ningkatkan kemampuan ekosistem untuk mengadopsinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pengalaman memberikan pelajaran bahwa sesungguhnya ekosistem

itu mampu memelihara dirinya sendiri asal tidak dirusak oleh manusia sendiri. Ada dua persyaratan yang secara umum harus diperhatikan, yaitu (1) kesesuaian sosial budaya dan sosial ekonomi, dan (2) kesesuaian ekologi-alam. (Kartasasmita, 2007).

Hal ini menjadi penting kita memahami suatu kelompok masyarakat sebelum suatu kebijakan akan diterapkan, sehingga kita mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya, tidak terkecuali dalam penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan, meskipun tidak bisa kita bantah dan banyak argumen penting dan sangat bermanfaat TIK dalam membantu berbagai pekerjaan. Tetapi kita tetap harus selalu berorientasi pada sasaran masyarakat yang menjadi pengguna, dari berbagai software yang ada, software dan hardware yang mana yang dibutuhkan.

Memahami Masyarakat dan Budaya dengan Etnografi

Yudistira K Garna (2008) menuturkan, etnografi diarahkan pada pengertian yang kini disebut sebagai etnosains (ethno-science), dan etnometodologi (ethno-methodology) atau sering disebut entografi baru (The New Ethnography). Artinya dalam pendekatan ini kita mencoba memahami gejala sosial tidak dari sudut dirinya sebagai peneliti, melainkan dari anggapan dan pandangan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, melalui pendekatan ini peneliti tidak bermaksud menilai apakah pandangan mereka itu salah atautkah benar, baik atau buruk, tetapi mencoba memahami dan menjelaskan pandangan mereka, yang dapat dilihat secara etik dan emik atau secara objektif dan subjektif. Dalam antropologi dan sosiologi, pendekatan ini bukanlah hal yang baru, tetapi sudah lama dikenal sebagai metode *verstehen*, yang biasa juga disebut kualitatif.

Gerry Phillipsen dalam Littlejohn, dalam buku berjudul *Theories of Human Communication*. (2009 : 184), menyebutkan, Ada empat asumsi etnografi komunikasi, “*Pertama*, para anggota budaya akan menciptakan makna yang digunakan bersama. Mereka menggunakan kode-kode yang memiliki derajat pemahaman yang sama. *Kedua*, para komunikator dalam sebuah komunitas budaya harus

mengkordinasikan tindakan-tindakannya. Oleh karena itu di dalam komunitas itu akan terdapat aturan atau sistem dalam komunikasi. *Ketiga*, makna dan tindakan bersifat spesifik dalam sebuah komunitas, sehingga antara komunitas yang satu dan lainnya akan memiliki perbedaan dalam hal makna dan tindakan tersebut. *Keempat*, selain memiliki kekhususan dalam hal makna dan tindakan, setiap komunitas juga memiliki kekhususan dalam hal cara memahami kode-kode makna dan tindakan.”

Etnografi merupakan pengamatan tentang aktivitas suatu kelompok sosial tertentu, dan deskripsi serta evaluasi aktivitas, kegiatan seperti itu juga disebut etnografi (Garna, 2009). Artinya kajian lapangan dengan model pendekatan etnografi relative lebih baik dilakukan sebelum pembangunan itu dilaksanakan, karena terjadi komunikasi dan dialog yang intensif dengan masyarakat sehingga kita dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Deskripsi dan uraian etnografi itu biasanya ditulis dalam bentuk esei, yang diterbitkan sebagai artikel atau monografi, laporan ilmiah tentang kebudayaan suatu masyarakat ataupun aspek kebudayaan dari masyarakat tertentu. Sederhananya kajian lapangan ini dapat dilakukan oleh siapapun

Kebijakan Pembangunan berlandaskan pada Masyarakat dan Kebudayaan.

Kebijakan kebudayaan bukan berarti tidak pernah ada di tatanan peta politik Nusantara, pemerintah kolonial Belanda tatkala menguatkan kekuasaannya di Nusantara, menempatkan semua jabatan di wilayah yang paling gawat dalam kaca mata Belanda dipercayakan kepada ahli-ahli yang tahu tentang kebudayaan dan masyarakat setempat untuk dengan bijak (lihay?) menangani masalah politik, dan sosial regional, ekonomi dan kebudayaan lokal kaum terjajah tanpa menimbulkan pemberontakan bersenjata yang akan amat mahal harganya untuk dibasmi (Garna, 2001), (Sihabudin, 2011).

Pendekatan etnologi ketika itu amat sangat diperhatikan untuk dapat lebih mengenal dan memahami suku bangsa yang beragam di Indonesia. Pendekatan itu mendapat tempat yang utama dalam melahirkan kebijakan untuk meneguhkan kewibawaan kolonial di Nusantara melalui penelusuran Nusantara

sebagai ethnologisch studiveld. Profesor De Josseline De Jong, mengungkapkan dua konsep untuk dapat memahami masyarakat di Nusantara, yaitu: Pertama, menganggap seluruh kepulauan Indonesia itu sebagai suatu lapangan penelitian etnologi, melalui konsep itu dimaksudkan satu daerah di mana tersebar banyak kebudayaan yang beraneka warna bentuknya, tetapi yang semuanya mengundang perhatian akan betapa sifat dasar itu cukup konsisten, sehingga dapat dilakukan suatu metode perbandingan antara masyarakat yang memiliki sifat dasar yang sama. Kedua, konsep mengenai pendiriannya tentang sifat dasar yang secara konsisten melandasi semua aneka warna masyarakat dan kebudayaan yang tersebar di seluruh Nusantara, dan sekaligus merupakan prinsip-prinsip inti susunan dari bentuk masyarakat Indonesia, (Garna, 2001). Karena itulah melalui pendekatan tersebut, diupayakan penguasaan wilayah atau perluasan territorial dengan cara “aman”.

Bagaimana dengan pelaksanaan program pembangunan di Indonesia yang cenderung tidak memperhatikan kebudayaan dan masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan selama ini cenderung mengabaikan kebijakan yang berlandaskan pada kebudayaan.

Bila kita lihat kebelakang beberapa tahun lalu, ada kelaparan penduduk di Papua. Padahal wilayah itu secara kasat mata alamnya telah menyediakan melimpah keperluan mereka; dan bukan itu saja, adanya kematian ratusan penduduk asli yang bukan sekedar berita, tetapi suatu kenyataan yang dijumpai di Mapanduma dan Timika, penyelesaian Timor Timur yang kemudian menjadi Timor Leste, Peristiwa Sanggau Ledo di Kalimantan Barat, dan kerusuhan antra-etnik di Sampit, kerusuhan di Poso, perseteruan yang tiada henti di Ambon dan Maluku, atau kerusuhan lainnya di berbagai kota di Indonesia, dan keinginan beberapa daerah membentuk provinsi atau melepaskan diri dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Garna, 2001), (Sihabudin, 2011).

Semuanya itu tidaklah dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan pembangunan yang mengabaikan kebudayaan, dan masyarakat. Dan dari pemahaman serta keinginan membentuk kebudayaan nasional sebagai pengejawantahan peradaban Indonesia (Garna, 2001).

Kebijakan pembangunan memang untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan manusia, hanya sayang dalam hal ini sering lupa memperhatikan manusia manakah yang dimaksud. Dalam lingkup Indonesia dengan berbagai kebudayaan dan etnik masalah ini menjadi penting diperhatikan. Apa yang dianggap sebagai hidup yang baik oleh orang Sunda tidak selamanya cocok bagi orang Banten atau Bugis; apa yang dipandang menguntungkan oleh orang Minangkabau tidak selamanya demikian bagi orang Batak atau orang Asmat; atau apa yang bernilai bagi orang Bali belum tentu bernilai bagi orang Baduy di Banten Selatan atau orang Bima di Pulau Sumbawa. Karena itu, persoalan pembangunan untuk siapa menjadi sangat penting diperhatikan, artinya, kita tidak dapat menggunakan ukuran yang ada pada sistem nilai kita saja, yang biasa menjadi penentu ukuran penentu kebijakan itu.

Dengan pemahaman ini kebijakan pembangunan dapat ditentukan dari pandangan atau pemikiran yang ada pada masyarakatnya, sehingga langkah yang akan ditentukan itu mengikuti realitas budaya yang dihadapi masyarakat.

Salah satu pendekatan dan riset yang dapat menjawab permasalahan tersebut adalah etnografi komunikasi, karena berupaya mengkonstruksi tradisi dan pola komunikasi dalam suatu etnik atau komunitas tertentu.

Perhatian pemerintah tersebut hanya mungkin akan menjadi efektif bila paradigma pembangunan secara keseluruhan telah digeser ke arah tercapainya pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people-centered development*). Konsep ini merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai sumberdaya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan proses pembangunan. Tumpuan utamanya adalah partisipasi masyarakat secara riil sejak proses inisiasi (penggalan gagasan), implementasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) sampai dengan tahap pasca proyek yang berupa kegiatan pemeliharaan dan pelestarian. Guna menciptakan hal tersebut, diperlukan penyiapan dan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Paradigma pembangunan berbasis rakyat ini sebenarnya bermakna dua. Pertama, sebuah paradigma yang dikembangkan bagi mereka yang kurang beruntung dalam proses pembangunan kelompok miskin, catat, terbelakang dan sebagainya. Kedua, sebagai paradigma menyeluruh yang melihat bahwa pembangunan sebagai sebuah gerak bersama yang saling terpadu dan terkait dari rakyat, baik “rakyat besar, menengah, kecil” maupun “rakyat maju, sedang dan terbelakang.” Paradigma tersebut bisa dipergunakan salah satu atau keduanya.

Kematian akibat kelaparan seperti terjadi di Papua tidak bakalan terjadi, manakala pengenalan beras dan nasi sebagai makanan pokok mereka di introduksi melalui teknik bercocok tanam yang sesuai dengan tuntutan lingkungan alam mereka sendiri. Bukan kebijakan yang dipaksakan untuk penyeragaman makanan pokok Indonesia (Garna, 2001).

Padahal dahulu kita pernah mendengar bahwa makanan pokok orang Papua, Maluku dan sekitarnya adalah sagu, masyarakat Madura makann pokoknya jagung. Kemudian dalam perkembangannya mulai mengalami pergeseran. Namun demikian dalam dua tahun terakhir ini kampanye dan sosialisasi makanan yang mengandung karbohidrat mulai marak di gerakkan melalui media massa, intinya mengajak masyarakat untuk tidak tergantung pada beras (nasi).

Demikian juga dengan intensifikasi pertanian di desa ‘Kanekes pada Orang Baduy seperti dikenalkan pemerintah itu tidak berjalan, karena selain bertentangan dengan pikukuh (adat istiadat, dan kepercayaan serta norma agama Sunda Wiwitan) yang merupakan keyakinan Orang Baduy yang mampu bertahan dari waktu ke waktu. Program itu juga tidak sesuai dengan kondisi geografis yang berbukit serta sumber atau hulu bagi sungai-sungai besar yang mengalir ke Banten Utara. (Kurnia dan Sihabudin, 2010). Dalam lingkup tersebut, program pembangunan yang seharusnya memperhatikan kepentingan dan tuntutan akan kebutuhan budaya dan masyarakat lokal dalam kerangka pengembangan kebudayaan nasional, artinya dengan metode etnografi komunikasi salah satunya dapat membantu kebijakan pembangunan dengan memperhatikan kebudayaan lokal, sekaligus untuk kepentingan nasional.

Dari sisi ini menunjukkan kepada kita bahwa politik penyeragaman kebudayaan yang dikemas dalam selimut kebudayaan nasional itu kini banyak digugat banyak pihak. Sehingga wujud UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah banyak disalah artikan yang cenderung hanya berorientasi pada kekuasaan dan pemerintahan saja, hal-hal yang terkait dengan potensi dan keunggulan lokal, budaya nyaris tidak banyak dibicarakan dan dibahas.

Semangat otonomi ini di apresiasi beragam dan berlebihan oleh setiap daerah, telah banyak melahirkan sikap ingin melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan pusat. Namun demikian, dari sudut pandang ilmu yang saya tekuni, realitas sosial-budaya yang berkembang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebab, kenyataan yang berkembang itu dapat menimbulkan banyak persoalan yang terwujud sebagai akibat meningkatnya sentimen kemasyarakatan yang didasarkan pada semakin menebalnya rasa kesuku-bangsaan di setiap daerah, terutama pada tataran daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Komunikasi Lokal: Komunikasi Partisipatoris, Kebersamaan, dan Musyawarah

Dari uraian tentang cara melihat kehidupan masyarakat Indonesia dan gerakannya yang dinamik, yang tersimpul melalui etnografi, hal itu memberikan kemungkinan tidak hanya bermanfaat bagi pemahaman landasan ideal belaka tetapi juga bagi upaya pada tataran tertentu yang bersifat operasional

Partisipasi masyarakat secara sadar, kritis, sukarela, murni, dan bertanggung jawab adalah baik, karena ada kemungkinan biaya pembangunan menjadi murah, baik karena memang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar membangun masyarakat bangsa dan negara. Tetapi kenyataannya sulit dilaksanakan. Sulitnya partisipasi masyarakat dilibatkan, lebih banyak bersumber dari kurangnya kemauan atau itikad baik, komitmen moralitas, dan kejujuran dari sebagian para komunikator, pemimpin atau penguasa, baik kalangan pemerintahan, swasta, dan masyarakat dari semua tingkatan. (Hamijoyo, 1993:11).

Ikut sertanya masyarakat secara aktif, belum tentu dapat didefinisikan sebagai partisipasi masyarakat

murni. Hal ini tergantung dari jenis dan kualitasnya peran dan aktivitas masyarakat. Peran yang paling berkualitas adalah partisipasi masyarakat sebagai perencana aktif, pemilik, dan pengelola program.

Pengamatan dan pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi murni masyarakat ada hubungannya dengan faktor-faktor kultural dan struktur sosial dalam masyarakat. Indonesia di kenal dengan "gotong royong", "mapalus" (Sulawesi Utara), "Subak" (suatu bentuk gotong royong untuk mengatur pengairan sawah di Bali). Di Srilanka ada "Smaradana", Philipina dikenal "Bayanihan". (Hamijoyo, 1993).

Partisipasi murni masyarakat kenyataannya berawal dengan adanya kebersamaan (togetherness, commonality). Kebersamaan dalam mengartikan atau mempersepsikan sesuatu. Kebersamaan dalam cara memecahkan masalah atau kesulitan, yang penting bagi masyarakat yang bersangkutan.

Kebersamaan dalam persepsi di kalangan suatu komunitas hanya mungkin dicapai manakala diprasyarati oleh komunikasi arus dua arah atau sirkular yang teratur, intensif, dan ekstensif. "Extensif" disini maksudnya upaya untuk memperteguh hubungan dengan lain-lain organisasi, lembaga, dan tokoh serta orang, selain kelompoknya sendiri. Menurut Hamijoyo (1993) ini penting demi kerjasama persahabatan (partnership) antar kelompok yang berbeda tujuan dan kegiatannya, yang akan memperlancar komunikasi. Sekaligus mengurangi persaingan atau ancaman suatu program dari pihak yang kurang mengerti.

Konsepsi kebersamaan ini memang penting sekali, bahkan menentukan, dalam proses komunikasi. Karena komunikasi dapat berarti proses atau usaha untuk "menciptakan kebersamaan dalam makna" (the production of commonness in meaning). Yang terpenting dalam komunikasi adalah kebersamaan dalam makna itu. Menurut Hamijoyo (1993), agar komunikasi dipahami dan diterima serta dilaksanakan bersama, harus dimungkinkan adanya peran serta untuk "mempertukarkan" dan "merundingkan" makna diantara semua pihak dan unsur dalam komunikasi ("exchange" and "negotiation" of meaning). Sebagai tujuan akhir berbagai kegiatan dalam masyarakat yang kita kejar adalah harmoni dan compatability atau

menurut istilah kita keselarasan dan keserasian.

Pertukaran dan perundingan makna ini dalam masyarakat Indonesia ada "lembaga" yang sudah membudaya dan khas untuk itu, yaitu lembaga musyawarah. Tekniknya adalah dialog yang dapat diartikan sebagai proses untuk mengenal, membandingkan dan mempertemukan unsur-unsur yang sama dari logika yang dimusyawarahkan.

Kebudayaan digunakan untuk membicarakan tentang pola tingkah laku dan perangkat kebiasaan tertentu sebagai acuan sikap dan tindakan manusia. Semua orang sebagai warga dan pendukung budaya masyarakat itu biasanya sepakat tentang nilai-nilai serta norma pokok bagi acuan berpikir dan tindakan. Akhirnya, dari situasi sosial seperti itu melahirkan peradaban Indonesia yang mengarahkan pada terciptanya *societal state* (masyarakat yang bebas dari bayang-bayang satu kekuasaan yang mengatasnamakan organisasi pemerintahan), dan kemudian lahir sebuah *civil society*. Berkenaan dengan kenyataan yang dihadapi ini, saya kembali menegaskan bahwa pendekatan etnografi dapat dijadikan pijakan ke arah penentuan kebijakan pembangunan untuk mencapai peradaban Indonesia sehingga cita-cita *civil society* menjadi nyata yang dikembangkan dari realitas kebudayaan yang memang tumbuh di bumi Nusantara ini.

TIK Dalam Kehidupan Seharian-Hari

Menurut Abdullah (2009), satu bentuk produk TIK adalah internet yang berkembang pesat di penghujung abad 20 dan di ambang abad 21. Kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Internet merupakan salah satu instrumen dalam era globalisasi yang telah menjadikan dunia ini menjadi transparan dan terhubung dengan sangat mudah dan cepat tanpa mengenal batas-batas kewilayahan atau kebangsaan.

Melalui internet setiap orang dapat mengakses ke dunia global untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang dan pada gilirannya akan memberikan pengaruh dalam keseluruhan perilakunya. Dalam kurun waktu yang amat cepat beberapa dasawarsa terakhir telah terjadi revolusi internet di berbagai negara serta penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Keberadaan internet pada masa kini sudah merupakan satu kebutuhan pokok manusia modern dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan global. Kondisi ini sudah tentu akan memberikan dampak terhadap corak dan pola-pola kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, setiap orang atau bangsa yang ingin lestari dalam menghadapi tantangan global, perlu meningkatkan kualitas dirinya untuk beradaptasi dengan tuntutan yang terus berkembang. (Abdullah, 2009).

Peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktifitas yang dibutukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya.

Beberapa penerapan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Prabowo (2008), antara lain dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP). ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan, cara lama kebanyakan.

Dalam dunia bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai *E-Commerce*. *E-Commerce* adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet.

Dalam dunia perbankan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan *Internet Banking*. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui *Internet Banking* antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening.

Dalam Pendidikan Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi audio/data, video/

data, audio/video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh (e-Learning) menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Dan dalam bidang kesehatan Sistem berbasis kartu cerdas (smart card) menurut Prabowo dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. (Prabowo,2008).

Simpulan dan Sraan

Simpulan

1) Memahami masyarakat melalui pendekatan etnografi merupakan strategi dalam menentukan kebijakan pembangunan dan penataan tradisi dalam sebuah komunitas masyarakat. 2) Pendekatan

etnografi dapat dihubungkan dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kukuh dari Sabang sampai Merauke, kesatuan itu ialah melalui pemahaman tradisi dan pola-pola komunikasi yang berkembang dalam kelompok etnik masyarakat indonesia, yang merupakan institusi sosial yang dihasilkan oleh peradaban sebagai kebudayaan yang tersebar di Wilayah Republik Indonesia. 3) Pendekatan etnografi dapat meminimalkan penolakan sebuah kebijakan pembangunan yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Saran

1) Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan menggunakan pendekatan etnografi dapat meminimalkan penolakan sebuah kebijakan pembangunan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. 2) Kebijakan pembangunan berbasis teknologi informasi perlu mempertimbangkan kebijakan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan masyarakat. dan 3) Pendekatan etnografi berkaitan dengan proses pemberdayaan TIK dalam mengangkat kebudayaan lokal.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Dahlan. 2009. *Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Kelas*. Makalah Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
- Ady Prabowo, Darmawan, 2008. *Makalah Mendeskripsikan Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Makalah. SMP Negeri 5 Probolinggo.
- Garna, Judistira K. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Primako Akademika: *The Judistira Garna Foundation*.
- Garna, Judistira K. 2008. *Studi Perbandingan Etnografi*, Bandung.Primako Akademika: *The Judistira Garna Foundation*.
- Garna, Judistira K. 2007. *Sistim Budaya Indonesia*. Bandung. Primako Akademika : *The Judistira Garna Foundation*.
- Garna, Judistira K. 2001. *Pendekatan Etnografi Ke Arah Kebijakan Kebudayaan Dalam Perkembangan Peradaban Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Gurubesar Antropologi dan Sosiologi. Bandung. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran.
- Hamijoyo, Santoso.S. 1993. *Landasan Ilmiah Komunikasi*. Pidato Ilmiah. Penerimaan Jabatan Gurubesar Tetap Pada Fakultas Ilmu Komunikasi. Surabaya. Universitas DR. Soetomo.
- Josseline De Jong, J.P.B. 1971. *Kepulauan Indonesia sebagai Lapangan penelitian Etnologi*. Jakarta. Seri terjemahan karangan-karangan Belanda, kerjasama antara LIPI dan KITLV.
- Kurnia, Asep., dan Sihabudin, Ahmad. 2010. *Saatnya Baduy Bicara*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2007. *Revitalisasi Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Disampaikan pada acara Wisuda Ke 44 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Jakarta, 3 November 2007.

Kuswarno, Engkus, 2008, *Etnografi Komunikasi*, Bandung. Widya Padjajaran.

Liitlejohn, Stephen W. dan Foss Karen A. 2009. *Theories of Human Communication*. Jakarta. Penerjemah. Muhammad Yusuf Hamdan. Penerbit Salemba Humanika.

Sihabudin, Ahmad, 2011. *Etnografi Komunikasi sebuah Pendekatan Kebijakan Pembangunan Berbasis Kebudayaan dan Pola Komunikasi Komunitas*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.

Yusanto, Yoki. 2011. *Tradisi Komunikasi Anggota kelompok Rendangan Dengan Kepala Adat*. Studi Etnografi Komunikasi Dalam Ritual Adat Bulan Purnama Opat Belas di Komunitas Adat Kesepuhan Cisungsang. Kabupaten Lebak. Banten. Thesis. Bandung. Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Padjadjaran.
